

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Teguh Samudra Baderan

NPP. 31.0912

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: teguhsamudrabaderan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Gorontalo Regency is in first place with the highest Expected Food Pattern (PPH) in Gorontalo Province. Even though Gorontalo Regency has the highest PPH in Gorontalo Province, it is still far from the national PPH. To overcome the Food Pattern problem, the Gorontalo Regency Government has issued Gorontalo Regent Regulation Number 25 of 2010 concerning Guidelines for Implementing the Movement to Accelerate Diversification of Local Resource-Based Food Consumption. **Purpose:** This research aims to determine and analyze the policy implementation of Gorontalo Regent Regulation Number 25 of 2010 concerning Guidelines for Implementing the Movement for the Acceleration of Diversification of Local Resource-Based Food Consumption. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data collection technique uses triangulation which combines observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman technique as three activity streams, namely data condensation, data display, and conclusion drawing. **Results:** Research conducted using Van Meter and Van Horn's theory provides the results of the Gorontalo Regent's Regulation Number 25 of 2010 concerning Guidelines for Implementing the Movement for the Acceleration of Diversification of Local Resource-Based Food Consumption which has been running well even though there are shortcomings including a lack of clarity in policy delivery, people who are not yet able to cultivate food crops, and an unstable economic environment in society. **Conclusion:** The government's efforts to accelerate the diversification of food consumption based on local resources have shown positive results with increasing PPH every year, however improvements are still needed in the delivery of policies, increasing community capacity, and improving economic conditions to be able to maximize local resources.

Keywords: Implementation, Consumption, Food, Diversification

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Gorontalo menempati urutan pertama dengan Pola Pangan Harapan (PPH) tertinggi di Provinsi Gorontalo. Meskipun Kabupaten Gorontalo memiliki PPH tertinggi di Provinsi Gorontalo namun masih jauh dari PPH nasional. Untuk

mengatasi masalah Pola Pangan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan dari Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yang menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman sebagai tiga arus aktifitas yakni kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn memberikan hasil Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal telah berjalan dengan baik meskipun terdapat kekurangan diantaranya adalah kurangnya kejelasan penyampaian kebijakan, masyarakat yang belum mampu mengolah tanaman pangan, dan lingkungan ekonomi masyarakat yang tidak stabil. **Kesimpulan:** Upaya pemerintah dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya PPH di setiap tahunnya, meskipun demikian masih diperlukan perbaikan dalam penyampaian kebijakan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perbaikan kondisi ekonomi untuk dapat memaksimalkan sumber daya lokalnya.

Kata Kunci: Implementasi, Konsumsi, Pangan, Penganekaragaman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pangan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia atau hewan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan energi mereka (Rokhmah et al., 2022). Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penganekaragaman pangan atau upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang (Rokhmah et al., 2022). Penganekaragaman konsumsi pangan, juga dikenal sebagai keragaman diet atau keragaman makanan, merujuk pada variasi dan keragaman makanan yang dikonsumsi oleh individu, keluarga, komunitas, atau populasi. Ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis makanan, nutrisi, sumber makanan, dan budaya makanan.

Indonesia memiliki kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati yang beraneka ragam. Hutan tropis, lahan pertanian, tambang mineral, serta laut yang luas memberikan potensi besar untuk sumber daya alam. Selain itu Indonesia adalah produsen berbagai jenis produk pangan, termasuk padi, kelapa sawit, kopi, dan rempah-rempah. Laut Indonesia juga menyediakan beragam hasil perikanan.

CIPS menyatakan bahwa skor 100 PPH (Pola Pangan Harapan) mencerminkan keragaman pangan dengan kombinasi optimal dari diet sehat dan bergizi. Selama periode 2015 hingga 2020, terjadi peningkatan skor PPH nasional, menunjukkan peningkatan variasi konsumsi pangan di kalangan masyarakat Indonesia. Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dari sembilan kelompok pangan, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, minyak nabati, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buahan, dan lainnya (Alta et al., 2023).

Kabupaten Gorontalo memiliki skor PPH tertinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 (Kementerian Pertanian, 2021). Tentunya dengan skor PPH tertinggi membuat Kabupaten Gorontalo menjadi yang paling baik dalam keanekaragaman konsumsi pangannya di antara Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan, pemerintah Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut memiliki target yaitu mencapai nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) 95. Untuk mencapai target tersebut terdapat aspek-aspek seperti aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan, aspek konsumsi pangan dan dukungan kelembagaan yang merupakan rencana dari pemerintah untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menaikkan skor Pola Pangan Harapan tersebut.

Penganekaragaman Pangan merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana pada Pasal 60 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Sehingga untuk mewujudkannya diperlukan peraturan yang mengatur tentang penganekaragaman itu sendiri seperti Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Provinsi Gorontalo berada pada urutan kedua puluh sembilan dari tiga puluh empat Provinsi dalam peringkat skor PPH Nasional tahun 2020 dengan skor PPH mencapai 76,6 (Badan Ketahanan Pangan, 2021). Hal ini terbilang tidak wajar dikarenakan Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi sumber daya alam hayati yang dapat mendukung adanya pola konsumsi pangan yang baik dan bergizi bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Salah satunya adalah potensi dari Jagung sebagai pangan karbohidrat nonberas yang jauh melebihi angka konsumsi seharusnya sudah memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak lagi bergantung pada beras. Namun pada kenyataannya, konsumsi jagung jauh dari jumlah konsumsi beras itu sendiri.

Jika dilihat dari kebiasaan masyarakat Provinsi Gorontalo, mereka cenderung menganggap bahwa memakan nasi milu yaitu nasi yang dimasak bersamaan dengan jagung tumbuk yang merupakan makanan khas daerah Provinsi Gorontalo sebagai makanan yang kurang modern sebagaimana dijelaskan oleh Haris warga Gorontalo yang diliput dalam liputan6.com yang menyatakan Nasi beras milu umumnya hanya tersedia di daerah terpencil di Gorontalo. Melihat dari masalah tersebut tugas pemerintah untuk meningkatkan keberagaman konsumsi tidak dapat dikatakan tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi jagung sebagai sumber daya lokal dan hal ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi mengenai konsumsi pangan sesuai dengan sumber daya lokalnya.

Masalah-masalah pangan memberikan pandangan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Padahal dalam Peraturan Bupati tersebut menjelaskan, pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan pendidikan pangan dan gizi kepada masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki landasan dari penelitian-penelitian terdahulu, berdasarkan penelitian tentang penganekaragaman konsumsi pangan. Rahmat Hidayat dan Adil Mubarak berjudul *Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) oleh Dinas Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sijunjung* (Hidayat & Mubarak, 2019), menemukan bahwa Program P2KP di Kabupaten Sijunjung, diatur dalam Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2017. Meskipun berjalan baik, ada hambatan dalam komunikasi langsung kepada masyarakat. Pendamping program terdiri dari empat orang. Komitmen kejujuran terlihat dari pedoman pelaksanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi kepemilikan lahan, pendidikan, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga. Penelitian Wan Harnanda berjudul *Implementasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (Studi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019)* (Harnanda, 2020), berhubungan tentang Pelaksanaan program untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui kegiatan KRPL pada tahun 2019 belum optimal. Kendalanya seperti kurang optimalnya transmisi atau penyaluran komunikasi dan ketidaktersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam dimensi struktur birokrasi. Selanjutnya penelitian dari Novi Handian, Aan Anwar Sihabudin dan Ii Sujai berjudul *Implementasi Kebijakan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis* (Handian et al., 2022), yang menjelaskan Implementasi Kebijakan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Karanganyar telah berjalan meskipun masih ada banyak masalah diantaranya tidak ada keamanan lahan dan pengepul hasil panen. Penelitian dari Devi Titania Diyono Putri dengan judul *Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Desa Sumbergondo Kota Batu* (Amalia Yunia Rahmawati, 2020), Hasil dari penelitian ini, pendanaan untuk kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Sumbergondo tidak berjalan optimal hal ini dikarenakan warga masih menggunakan dana pribadi untuk mengembangkan program ini. Muhammad Habibi dan Arbainah Saidi dengan judul penelitian *Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari Sebagai Kebijakan Sosial Pencegah Stunting Sejak Dini Di Kabupaten Kutai Kartanegara* (Habibi & Saidi, 2023) Secara garis besar kelompok wanita tani telah menjalankan misi untuk mencegah berkembangnya kasus stunting dengan mengembangkan penganekaragaman menggunakan sumber daya lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan mengangkat konteks yang belum pernah diteliti sebelumnya diantaranya dengan membandingkan dua pendapat yang mana pendapat langsung dari dinas ketahanan pangan dan masyarakat yang mengikuti program penganekaragaman pangan yang mana dengan membandingkan kedua pendapat tersebut akan mendapatkan titik terang dari masalah yang ada. Penulis juga memfokuskan penelitian tentang penganekaragaman pangan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang mana nyatanya sumber daya lokal malah jarang digunakan masyarakat itu sendiri.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Program Pemerintah Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat serta mendukung dalam pelaksanaan Program Pemerintah Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo. Dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan Program Pemerintah Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan *Qualitative Method* Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Murdiyanto, 2020). Sementara itu Implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan, yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil (Hamdi, 2022). Dan untuk teori implementasi kebijakan sendiri menggunakan teori milik Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan 6 dimensi yang mempengaruhi kinerja kebijakan diantaranya Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan, Sikap Para Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (Van Meter & Van Horn, 1975). Penulis mengumpulkan data melalui teknik triangulasi dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Sementara teknik analisis data menggunakan kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994)

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis menggunakan teknik purposive Sampling dan Accidental Sampling (Sugiyono, 2013), kemudian melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan dan 5 orang masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang mengikuti program gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi kebijakan Program Pemerintah Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo. menggunakan teori milik Van Meter dan Van Horn yang yang menjelaskan 6 dimensi yang mempengaruhi kinerja kebijakan diantaranya Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan, Sikap Para Pelaksana, serta Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik (Van Meter & Van Horn, 1975). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Kebijakan Program Pemerintah Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar Kebijakan: Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 25 Tahun 2010 menetapkan pedoman untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan aman. Kebijakan ini telah dianggap memenuhi standar oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, meskipun ada tantangan dari segi bantuan yang diterima petani yang dinilai belum cukup.

Sasaran Kebijakan: Tujuan kebijakan adalah menganeekaragaman konsumsi pangan, namun implementasinya menghadapi kendala karena masyarakat lebih memilih menjual hasil panen mereka daripada mengonsumsinya, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya tepat sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia: Personel yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dinilai memiliki kualifikasi yang memadai, meskipun ada tantangan dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang lebih suka mengonsumsi makanan monoton.

Sumber Daya Finansial: Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, tetapi perlu monitoring yang ketat untuk memastikan program berjalan efektif.

Sumber Daya Fasilitas: Pemerintah menyediakan bibit, alat pertanian, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, namun efektivitas penggunaannya perlu terus dipantau.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Keadaan Fragmentasi: Pembagian tugas di Dinas Ketahanan Pangan dilakukan dengan baik, dengan kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan kemampuan individu.

Standar Operasional Prosedur (SOP): SOP yang ada belum efektif dalam menjaga keberlanjutan program tanpa pengawasan pemerintah.

4. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Transformasi Kebijakan: Masyarakat menerima bantuan pemerintah, tetapi ada kesulitan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi hasil panen sendiri.

Kejelasan Penyampaian Kegiatan: Penyampaian kebijakan belum diterima dengan baik oleh masyarakat, membutuhkan metode komunikasi yang lebih kreatif dan mudah dipahami.

Konsistensi Kebijakan: Pemerintah terus melakukan berbagai program untuk mendukung penganekaragaman pangan, namun konsistensi pelaksanaan memerlukan peningkatan.

5. Sikap Para Pelaksana

Pengetahuan, Pemahaman, dan Pendalaman Pelaksana: Para pelaksana memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan program yang dijalankan, meskipun masyarakat masih kurang memahami tujuan program.

Respon Pelaksana: Para pelaksana menunjukkan tanggung jawab dan antusiasme dalam menjalankan program pemerintah.

Intensitas Terhadap Kebijakan: Ada komitmen yang kuat dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan antusiasme dari masyarakat dalam menerapkan pola pangan yang beragam.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan Sosial: Budaya masyarakat Gorontalo yang cenderung mengonsumsi makanan monoton mempengaruhi pola konsumsi yang beragam.

Lingkungan Ekonomi: Kabupaten Gorontalo merupakan penghasil pangan terbesar di Provinsi Gorontalo, dan kondisi ekonominya tidak menghalangi bantuan dari pemerintah.

Lingkungan Politik: Lingkungan politik di Kabupaten Gorontalo cenderung stabil dan mendukung pelaksanaan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan.

3.2. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Kebijakan Program Pemerintah Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Gorontalo**

Faktor Pendukung:

1. Tersedianya Dana dan Fasilitas:

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 didukung oleh dana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, termasuk program tahunan seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang memiliki tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Bantuan tersebut mencakup bibit, alat pertanian, dan pupuk bersubsidi, serta dipantau secara ketat.

2. Program-Program Pemerintah:

Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara konsisten menjalankan berbagai program tahunan seperti KRPL, Obor Pangan Lestari (OPAL), dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Program-program ini bertujuan untuk menganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan memberikan dukungan berupa dana, alat pertanian, dan monitoring untuk memastikan keberlanjutan program.

3. Pekarangan dan Lahan Masyarakat:

Kabupaten Gorontalo memiliki potensi lahan yang besar, termasuk 4.107 hektar lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi lingkungan yang mendukung berbagai jenis tanaman seperti padi, kangkung, terong, tomat, dan cabai menjadi faktor pendukung penting dalam upaya penganekaragaman konsumsi pangan.

Faktor Penghambat:

1. Kejelasan Penyampaian Kebijakan:

Kurangnya kejelasan dan pemahaman masyarakat mengenai detail dan tujuan kebijakan menyebabkan rendahnya partisipasi dan efektivitas program. Sosialisasi yang kurang intensif dan materi komunikasi yang tidak mudah dipahami mengakibatkan miskomunikasi dan salah pengertian mengenai kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia:

Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sumber daya manusia lokal menghambat implementasi program. Masyarakat masih memerlukan bimbingan dan belum mampu mandiri dalam mengurus pekarangan mereka, sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah tetap tinggi.

3. Lingkungan Ekonomi Masyarakat:

Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil atau rendah membuat mereka lebih fokus pada kebutuhan ekonomi dasar. Hal ini mengurangi alokasi waktu dan sumber daya untuk mendukung program penganekaragaman pangan, sehingga partisipasi masyarakat dalam program menjadi terbatas.

4. Kebijakan Tidak Tepat Sasaran:

Kebijakan yang dijalankan sering kali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Program-program yang ada mungkin tidak relevan atau tidak menyentuh masalah utama yang dihadapi masyarakat, menyebabkan rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam inisiatif pemerintah.

3.3. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam Menganekaragamkan Konsumsi Pangan dengan Berbasis Sumber Daya Lokal

1. Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan:

Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan sosialisasi tahunan kepada Kelompok Wanita Tani/DASA WISMA. Sosialisasi ini memberikan edukasi mengenai pentingnya mengonsumsi berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan, bertujuan mengubah pola pikir dan kebiasaan makan masyarakat agar lebih bervariasi dan seimbang.

2. Pelatihan dan Pengajaran Tentang Keamanan Pangan:

Dinas Ketahanan Pangan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan di kalangan pelaku usaha seperti pasar, kios, warung, dan toko. Sosialisasi ini memberikan pengetahuan tentang praktik-praktik penanganan, penyimpanan, dan distribusi makanan yang aman untuk konsumen, mencakup cara menghindari kontaminasi silang dan pentingnya penyimpanan makanan pada suhu yang tepat.

3. Program Bantuan dalam Mengembangkan Kebun atau Pertanian Skala Kecil di Pekarangan Rumah:

Program ini mempromosikan pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, melibatkan bantuan dan bimbingan dalam mengembangkan kebun kecil. Masyarakat didorong menanam berbagai jenis tanaman pangan, yang membantu mengurangi biaya pangan rumah tangga dan memastikan ketersediaan makanan segar dan bergizi melalui teknik bercocok tanam yang berkelanjutan dan penggunaan pupuk organik.

4. Pengalihan Keuntungan Lokal ke Arah Pemenuhan Penganekaragaman Pangan:

Dinas Ketahanan Pangan mendorong keluarga menjual hasil pekarangan yang melebihi kebutuhan mereka. Pendapatan tambahan dari penjualan ini digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan keragaman pangan, serta kesejahteraan ekonomi keluarga. Program ini juga memberikan manfaat ganda dengan memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Setelah melakukan penelitian terdapat perbandingan antara hasil penelitian dan penelitian terdahulu. Perbandingan antara hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian yang diuraikan mengungkap beberapa perbedaan signifikan diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam penelitian sebelumnya, beberapa hambatan yang diidentifikasi termasuk kurangnya optimalitas transmisi komunikasi, ketidakterediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan masalah keamanan lahan serta pengepul hasil panen. Di sisi lain, dalam hasil penelitian implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 di Kabupaten Gorontalo, hambatan utamanya meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kebijakan yang kurang relevan dengan kondisi lokal.

Kedua, terdapat perbedaan dalam efektivitas implementasi program. Sementara beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi program belum optimal karena berbagai hambatan yang dihadapi, hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa meskipun program di Kabupaten Gorontalo telah didukung oleh dana dan fasilitas yang memadai serta inisiatif pemerintah, masih belum mencapai target yang diharapkan.

Ketiga, perbedaan terletak pada jenis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program. Meskipun beberapa hambatan serupa diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya, upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Gorontalo lebih terfokus pada sosialisasi tahunan, pelatihan keamanan pangan, bantuan pertanian, dan pemanfaatan pekarangan rumah. Hal ini menunjukkan variasi dalam strategi yang diadopsi oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Dimana daerah lain diantaranya Kabupaten Sijunjung memfokuskan pada penganeekaragaman pangan dengan sosialisasi sedangkan pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi dan juga pelatihan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 di Kabupaten Gorontalo tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berjalan dengan baik namun belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun program ini didukung oleh dana dan fasilitas yang memadai serta berbagai inisiatif pemerintah seperti KRPL, OPAL, dan P2L, beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kebijakan yang kurang relevan dengan kondisi lokal masih menghambat pelaksanaan program ini secara optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas program, Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi tahunan, pelatihan keamanan pangan, bantuan pertanian, dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan. Namun, diperlukan peningkatan dalam komunikasi, pelatihan, dukungan ekonomi, serta penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, tujuan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Gorontalo dapat tercapai lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki kendala utama berupa keterbatasan waktu dan biaya. Selain itu, penelitian hanya bisa dilaksanakan di beberapa kecamatan sebagai sampel untuk mengkaji implementasi kebijakan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih sedikit temuan penelitian yang ditemukan, oleh karena itu diharapkan agar penelitian ini dapat diteliti lebih dalam lagi mengingat pentingnya gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan makanan yang beranekaragam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan masyarakat Kabupaten Gorontalo beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alta, A., Auliya, R., & Fauzi, A. N. (2023). *Policy Barriers to a Healthier Diet: The Case of Trade and Agriculture*. Cips-Indonesia. <https://repository.cips-indonesia.org/publications/559018/>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Krpl) Di Desa Sumbergondo Kota Batu*.
- Badan Ketahanan Pangan. (2021). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan*. Kementerian Pertanian RI. <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/download/3e8f561f9e61f478b634605ccf1effb4.pdf>
- Bupati Gorontalo. (2010). *Peraturan Bupati 25 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*.
- Habibi, M., & Saidi, A. (2023). *Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari Sebagai Kebijakan Sosial Pencegah Stunting Sejak Dini Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/8103/pdf>
- Hamdi, M. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*.
- Handian, N., Sihabudin, A. A., & Sujai, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Pekarangan Pangan Lestari di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Universitas Galuh, Ciamis. <http://repository.unigal.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/1037/135.NoviHandian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Harnanda, W. (2020). *Implementasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (Studi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019)*. <https://repository.uir.ac.id/15628/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/15628/1/187322039.pdf>
- Hidayat, R., & Mubarak, A. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2kp) Oleh Dinas Pangan Dan Perikanan Di Kabupaten Sijunjung*. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1093872&val=13974&title=IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN P2KP OLEH DINAS PANGAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1093872&val=13974&title=IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PROGRAM%20PERCEPATAN%20PENGANEKARAGAMAN%20KONSUMSI%20PANGAN%20P2KP%20OLEH%20DINAS%20PANGAN%20DAN%20PERIKANAN%20DI%20KABUPATEN%20SIJUNJUNG)
- Kementerian Pertanian. (2021). *Direktori Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota Wilayah Timur Tahun 2021*. <https://badanpangan.go.id/buku-digital>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif (First)*. UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Rokhmah, L. N., Setiawan, R. B., Purba, deasy handayani, Anggraeni, N., Suhendriani, S., Faridi, A., Widhi haspari, M., Kristianto, Y., Hasanah, L. N., Argaheni, N. B., Anto, Handayani, T., & Rasmaniar. (2022). *Pangan Dan Gizi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. SAGE Publications.